

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara terbesar yaitu berasal dari pajak, namun selain penerimaan pajak ada juga penerimaan yang tidak berasal dari pajak. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1997 dalam Pasal 1 Ayat 1 Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan. Penerimaan Negara Bukan Pajak telah diatur oleh pemerintah dalam Undang-undang Republik Indonesia sebagai dasar hukumnya baik dari segi penjelasannya, jenis dan penyetorannya, penggunaannya dan tata cara penyampaiannya.

Balai Besar Teknologi Konversi Energi (B2TKE) adalah salah satu lembaga riset dan teknologi yang menyelenggarakan fungsi PNBPN. Didalam menjalankan tugasnya melayani masyarakat, Balai Besar Teknologi Konversi Energi melakukan pemungutan dalam bentuk PNBPN yang jenis dan tarifnya telah diatur dalam PP No 51 Tahun 2018 tentang jenis dan tarif PNBPN pada BPPT. Ada tiga jenis pelayanan di B2TKE, yaitu layanan jasa konsultasi, jasa pengujian dan jasa pelatihan. Pelaksanaan pelayanan jasa dimulai dari datangnya permintaan jasa layanan oleh pihak mitra kemudian dilanjutkan dengan pembuatan kontrak kerjasama antara pihak mitra dan B2TKE. Pihak mitra akan menerima layanan jasa apabila sudah melakukan pembayaran kepada B2TKE. Dari hasil pelayanan ini yang nantinya akan disetor sepenuhnya ke Bendahara Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Penerimaan Negara Bukan Pajak ini harus dikelola dengan baik sehingga dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang berwenang. Sistem dan prosedur yang baik dapat membantu menghindari penyimpangan dan penyelewangan dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik mengambil topik Sistem Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan instansi mengenai sistem akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi?
2. Bagaimana sistem akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi?
3. Bagaimana sistem pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBS.
 2. Dilarang memurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBS.

1.3 Tujuan

Adapun tujuan penulisan Laporan Tugas Akhir ini adalah untuk menjabarkan sistem akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi, yang meliputi :

1. Memaparkan kebijakan instansi mengenai sistem akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi
2. Menguraikan sistem akuntansi atas Penerimaan Negara Bukan Pajak
3. Memaparkan sistem pengendalian internal terhadap Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai Besar Teknologi Konversi Energi

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai pengetahuan dan pemahaman di dalam bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak di Balai Besar Teknologi Konversi Energi.
2. Agar penulis mengetahui prosedur kegiatan dalam proses Penerimaan Negara Bukan Pajak.
3. Dapat memberikan manfaat dan informasi kesemua pembaca yang dapat digunakan sebagai bahan masukan mengenai pemungutan Penerimaan Negara Bukan Pajak.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Karakteristik Akuntansi Pemerintah dan Akuntansi Bisnis

Karakteristik Akuntansi Pemerintah berbeda dengan Akuntansi Bisnis, perbedaanya (Nuramalian H dan Achmad F, 2017) seperti:

1. Dalam akuntansi Pemerintah tidak ada laporan laba.
2. Pemerintah membukukan anggaran ketika anggaran tersebut dibukukan.
3. Akuntansi pemerintahan akan membukukan pengeluaran modal dalam perkiraan neraca dan hasil operasional.
4. Akuntansi pemerintahan bersifat kaku karena sangat bergantung pada peraturan perundang-undangan.

Meskipun ada perbedaan, akuntansi pemerintah tetap memiliki kesamaan dengan akuntansi bisnis yaitu:

1. Menggunakan sistem bagan perkiraan standar.
2. Memberikan informasi atas posisi keuangan dan hasil operasi.
3. Mengikuti prinsip-prinsip dan standar akuntansi yang diterima umum.